

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan industri dan teknologi dari masa ke masa semakin tinggi tingkat perkembangannya. Sejak bergulirnya era teknologi 4.0 tingkat perkembangan teknologi semakin tak terbendung. Jika dahulu teknologi merupakan hal yang paling enggan orang untuk melirik, lama kelamaan orang yang tidak mengetahui perkembangan teknologi akan semakin tertinggal. Fenomena ini bukanlah menjadi hal yang istimewa karena teknologi yang pesat seperti sekarang ini merambah hampir ke semua sendi kehidupan baik individu maupun masyarakat.

Teknologi ialah suatu kumpulan alat, aturan dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan (Maunel Castells, ibid : 5).

Penerapan teknologi digunakan dalam berbagai sektor, baik sektor industri, sektor informasi dan telekomunikasi, perdagangan, sektor perhubungan, sektor pertahanan dan keamanan, maupun dari sektor – sektor yang lebih kecil cakupannya. Pada sektor industri penerapan teknologi terbaru sudah mewarnai industri besar menengah dan industri kecil, hampir semua industri sekarang sudah menggantikan posisi manusia sebagai pekerja dengan menggunakan robot.

Pada lembaga pemerintahan dampak dari kemajuan teknologi juga sudah bisa dirasakan. Sebuah lembaga pemerintahan dalam merancang sistem kerjanya mau tidak mau harus memadukan antara kerja konvensional dengan sistem kerja otomatis. Sehingga sistem kerja baik itu yang bersifat pelayanan, maupun tata administrasi dan tata pelaporan dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan terarah dengan hasil yang transparan dan akuntabel,

Sejak tahun 1999 Indonesia telah memasuki era baru pemerintahan yakni munculnya paradigma hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dengan diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, dimana setiap kepala daerah diberikan wewenang untuk mengelola sendiri rumah tangga daerahnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemberian wewenang untuk setiap kepala daerah tentu saja dengan pengawasan pemerintah pusat sehingga segala bentuk pengelolaan rumah tangga daerah atau asset daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, karena setiap detail pengelolaan asset harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

Kabupaten Ciamis merupakan daerah yang termasuk ke dalam pemerintahan Propinsi Jawa Barat yang berada di sebelah timur dan berbatasan langsung dengan pemerintahan daerah Propinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu kabupaten yang banyak sekali mengandalkan pendapatan asli daerahnya dari sektor pajak di samping pendapatan asli daerah yang disumbangkan oleh sektor lainnya seperti sektor pariwisata, industri, jasa, tambang dan sumber pendapatan lainnya.

Salah satu sumber pajak daerah berasal dari pajak kendaraan bermotor, dimana kendaraan bermotor merupakan semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak. Pajak kendaraan bermotor dikenakan atas jenis kendaraan bermotor yang dimiliki oleh subyek pajak. Besar kecilnya penerimaan pajak kendaraan dipengaruhi oleh pertumbuhan volume kendaraan bermotor.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ciamis

No.	ASAL PENERIMAAN	2019		2020	
		TOTAL PENERIMAAN	%	TOTAL PENERIMAAN	%
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	75.450.406.000,-	32,5%	73.235.838.000,-	32,73%
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	44.332.430.000,-	18,5%	29.430.948.000,-	13,2%
3.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.005.930.300,-	0,84%	469.481.300,-	0,02%
4.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	46.267.701.667,-	19,3%	41.673.079.219,-	18,6%
5.	Pajak Air Permukaan	72.666.500,-	0,03%	80.702.200,-	0,03%
6.	Pajak Rokok	70.832.697.005,-	29,5%	78.882.250.783,-	32,3%
JUMLAH		239.401.832.472,-	100%	223.722.298.122,-	100%

(sumber Laporan Bulanan Pusat Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Ciamis, 2020).

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sumber pajak daerah Kabupaten Ciamis dari sektor pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pajak terbesar,

apabila sumber pajak dari kendaraan bermotor dihitung berdasarkan Pajak Kendaraan bermotor, BBN Kendaraan bermotor, maka nilai yang dicapai oleh Dispenda Kabupaten Ciamis pada Desember 2020 sebesar 103.136.267.300,- (*Seratus Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah*) atau jika di presentasikan jumlah pajak dari PKB, BBNKB adalah 46 % dari seluruh penerimaan pajak di kabupaten Ciamis.

Hal itu sebetulnya berbanding terbalik jika dibandingkan dengan Bulan Desember pada Tahun 2019 jumlah pendapatan total lebih besar yaitu sebesar **Rp239.401.832.472,00** (*Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) atau terjadi penurunan pendapatan dari sektor pajak sebesar 93%. Sementara pertumbuhan jumlah volume kendaraan setiap tahun meningkat. Dengan demikian berarti ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam hal cara pembayaran pajak, yang salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor.

Pada ahun 2019 cara pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ciamis masih dilakukan secara langsung dengan mengharuskan wajib pajak mendatangi kantor Samsat, sementara pada awal tahun 2020 sistem pembayaran sudah ditambah dengan menggunakan *e-payment* tetapi justru pendapatan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan. Setelah di teliti ada beberapa penyebab penurunan pendapatan pajak yaitu :

1. Pendapatan tersebut belum sepenuhnya masuk ke kas daerah sesuai dengan data masih ada 54% wajib pajak yang belum secara rutin melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

2. Dampak Pandemi Covid-19 yang hampir merubah tatanan kehidupan, tatanan ekonomi serta berbagai perubahan pola.
3. Kurangnya kesadaran dari para wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya sebagai wajib pajak terutama pajak kendaraan bermotor.
4. Kurangnya sosialisasi dan informasi yang disampaikan atau di terima warga masyarakat terutama wajib pajak yang wilayahnya berada di pelosok.
5. Kurangnya sentra penerimaan pembayaran pajak yang di sediakan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis, sehingga masyarakat yang akan membayar pajak menjadi malas.
6. Pada saat melaksanakan pembayaran pajak memerlukan waktu yang lama karena antrian yang panjang pada anjungan yang disediakan oleh Dispenda tidak seimbang dengan jumlah wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisa tersebut Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Kabupaten Ciamis, melalui Samsat berupaya lebih mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak, dengan melakukan berbagai upaya agar pendapatan asli daerah dari sektor perpajakan dapat dilaksanakan secara optimal.

Alasan mengapa pajak kendaraan bermotor harus diprogramkan secara optimal adalah ketentuan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, yaitu pajak yang di kelola oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dispenda propinsi Jawa Barat.

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak terutama dari pajak kendaraan bermotor, maka pemerintah daerah melalui Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) melakukan terobosan dengan merubah cara

pembayaran langsung di kantor Samsat dengan jam kerja terbatas di daerah masing – masing, menjadi pembayaran yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan kecanggihan teknologi informasi yang lebih di kenal dengan *e-payment*.

Melalui aplikasi ini wajib pajak tidak perlu datang dan antri di kantor Samsat, hanya tinggal mengunduh aplikasi *e-payment* pada gawai kemudian tinggal memasukkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), maka besarnya nilai pajak akan terdeteksi secara otomatis, setelah itu besarnya pajak bisa di bayarkan langsung via transfer Bank , *e-commerce* (Tokopedia, bukalapak,) atau *merchant* seperti Alfamart, Indomart, atau gerai – gerai, tanpa harus menunggu antrian berjam – jam.

Dengan adanya *e-payment* otomatisasi / modernisasi pembayaran administrasi perpajakan kendaraan bermotor, yang semakin maju, akses yang mudah bagi wajib pajak dibandingkan dengan pembayaran pajak secara langsung maka peneliti mengambil judul bagi penulisan Usulan Penelitian ini yaitu “**Analisis Komparatif Metode Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Secara Langsung dan E-Payment Pada Samsat Kabupaten Ciamis**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis membuat identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor yang belum optimal disebabkan kurang kesadaran dari masyarakat wajib pajak.

2. Terbatasnya tempat pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, karena pelayanan pembayaran hanya dapat dilakukan di Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).
3. Terbatasnya waktu pelayanan pembayaran pajak, sehingga masyarakat wajib pajak enggan untuk melakukan pembayaran pajak karena harus menunggu antrian yang panjang sehingga membuang waktu.
4. Pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung memerlukan waktu yang lama terutama bagi masyarakat wajib pajak yang tinggal jauh dari pusat kota kabupaten.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tentang Analisis Komparatif Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Secara Langsung dan *E-Payment* Pada Samsat Kabupaten Ciamis maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Ciamis.
 - a. Pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung
 - b. Pembayaran pajak kendaraan bermotor secara *E-payment*
2. Bagaimana analisis komparatif pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung dan *e-payment* pada Samsat Kabupaten Ciamis.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan:

1. Untuk mengetahui pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung pada Samsat Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui pembayaran pajak kendaraan bermotor secara *e-payment* pada Samsat Kabupaten Ciamis.
3. Untuk menganalisis secara komparatif pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung dan *e-payment* pada Samsat Kabupaten Ciamis.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai bentuk pelayanan kepada masyarakat khususnya wajib pajak dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan metode pembayaran secara langsung maupun *e-payment*.

2. Peneliti

Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang relevan serta sebagai bahan untuk pembandingan bagi penelitian selanjutnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan berguna untuk :

1. Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk Dinas Pendapatan Daerah dan Kantor Bersama SAMSAT agar dapat melakukan perbaikan terkait pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang pelayanan kepada wajib pajak dalam hal sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis elektronik.

2. Wajib Pajak

Hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi wajib pajak dan masyarakat pada umumnya dan pengembangan lebih lanjut terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2017:60), mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting.

Sedangkan menurut Suriasumantri dalam Sugiyono (2017:60), kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.

Berdasarkan dua teori di atas dapat disimpulkan bahwa kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap gejala – gejala yang menjadi objek permasalahan yang saling berhubungan.

Samsat Kabupaten Ciamis mempunyai target meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) terutama yang dihasilkan dari sektor pajak. Pajak terbesar sebagai sumbangsih pendapatan daerah adalah pajak kendaraan bermotor di samping pajak yang dihasilkan dari pajak rokok. Upaya dalam mengoptimalkan pendapatan pajak terutama dari pajak kendaraan bermotor terus dilakukan agar pendapatan daerah semakin meningkat. Selain memperhitungkan jumlah wajib pajak (kuantitas), banyaknya (kualitas) wajib pajak yang rutin melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak menjadi sasaran peningkatan pendapatan daerah.

Banyak faktor yang menyebabkan naik turunnya tingkat pendapatan pajak, namun setelah penulis teliti ada beberapa penyebab terjadinya fluktuasi pendapatan yang paling dominan adalah dari segi metode pembayaran pajak yang biasa dilakukan dengan menggunakan sistem langsung.

Metode seringkali menjadi pengukur keberhasilan suatu proses. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pajak kendaraan bermotor selama ini mengandalkan sistem langsung yaitu para wajib pajak harus datang sendiri ke kantor SAMSAT untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Dengan hal

tersebut tidak mudah bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya apalagi jika memperhitungkan waktu, biaya dan tenaga yang harus mereka keluarkan.

Oleh karena itu, alternatif yang lebih baik salah satunya adalah dengan metode pembayaran *online* melalui *e-payment* yang bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, siapapun dan yang tidak merepotkan para wajib pajak dan ini akan berimbas kepada rutusnya para wajib pajak membayar kewajibannya. Dampaknya dengan semakin mudahnya metode pembayaran, keinginan pemerintah daerah untuk mendapatkan jumlah penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor diharapkan akan semakin besar. Maka kerangka pemikiran untuk penelitian yang dilakukan ini adalah untuk memperoleh jawaban atas **Analisis Komparatif Metode Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Secara Langsung dan *e-Payment* Pada Samsat Kabupaten Ciamis.**

1.6.1 Landasan Teori

Menurut Pius Partanto & M. Dahlan Barry (2017 : 79), pengertian metode adalah cara yang teratur dan sistematis dalam melakukan suatu kegiatan. Sementara sistem pembayaran adalah suatu sistem yang melakukan pengaturan kontrak, fasilitas pengoperasian dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran “nilai” antar perorangan, bank dan lembaga lainnya baik domestik maupun antar negara (Aulia Pohan 2017 : 121).

Sehingga metode pembayaran adalah cara yang teratur dan sistematis dalam melakukan pembayaran dalam suatu sistem yang melakukan penyampaian, pengesahan, dan memenuhi kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran antara perorangan dengan bank atau antara perorangan dengan lembaga lainnya.

Menurut Fikri (2014) sistem pembayaran memiliki beberapa komponen yang saling terkait dengan yang lain, yaitu :

1. Kebijakan

Kebijakan sistem pembayaran ini akan bermaksud bahwa adanya peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penerima pembayaran tersebut. Maka pada setiap negara pasti memiliki kebijakan sistem pembayaran yang berbeda. Hal ini dapat disebabkan adanya kebijakan-kebijakan yang berbeda antara sistem moneter dan sistem bank. Di Negara Indonesia terutama bank Indonesia memiliki prinsip kebijakan yaitu: keamanan, efisiensi, kesetaraan, akses perlindungan konsumen.

2. Kelembagaan

Dalam sistem pembayaran memiliki berbagai lembaga yang secara langsung atau tidak langsung akan berperan dalam meliputi sistem pembayaran. Pada umumnya lembaga yang terkait seperti : bank, pasar modal, jasa jaringan komunikasi, pembukaan kartu kredit.

3. Instrument Pembayaran

Intrument dalam sistem pembayaran mengartikan bahwa adanya alat media yang digunakan dalam sistem pembayaran. Instrument yang dimaksud merupakan

sistem pembayaran tunai dan non tunai, maka dapat dikatakan juga bahwa instrument tunai merupakan uang kertas dan uang logam yang selama ini kita kenal, sementara dari sistem pembayaran non tunai merupakan alat sistem pembayaran yang dimana bisa dikatakan sebagai *paperbased instrument*. Namun dengan seiring berjalan waktu teknologi kedepannya semakin berkembang maka sekarang banyak yang menggunakan *electronic money (e-money)*.

4. Mekanisme Operasional

Sistem pembayaran sendiri memerlukan suatu sistem mekanisme yang baik guna dalam bentuk operasional dapat melakukan perpindahan dana dari rekening ke rekening lainnya. Dalam mekanisme ini sistem pembayaran itu sendiri harus bisa menjamin kelancaran dalam melakukan kegiatan operasional tersebut, sehingga pengguna dapat melakukannya dengan nyaman.

Menurut Wahyu dalam Firmansyah (2013:78) *Electronic Payment (e-payment)* merupakan system pembayaran yang mendukung pada e-commerce dan memberi keuntungan pada transaksi bisnis dengan meningkatkan layanan kepada pelanggan, peningkatan proses cash management, hemat waktu dan efisien, transaksi pembayaran dapat dilakukankapan saja, dimana saja, dengan berbagai media dan tidak terbatas. Layanan *e-payment* digunakan untuk berbagai kebutuhan melalui *payment media Bank (ATM, phone banking, internet banking, mobile banking, teller)*. *E-payment* biasanya di gunakan suatu perusahaan dengan menjalin kerja sama dari sejumlah lembaga perbankan. Seiring berkembangnya *e-payment* yang di gunakan sesuai kebutuhan suatu perusahaan maka berkembanglah beberapa

macam bentuk sistem pembayaran *e-payment* antara lain *E-Wallet*, *E-Cash*, *electronic cheque*, *smartcard*.

Menurut *Federal Financial Institutions Examination Council* (2010), pembayaran elektronik adalah praktek pembayaran baru untuk ritel di mana seorang pedagang mengambil informasi pembayaran untuk barang dan jasa dan menempatkan informasi ini dalam sebuah *electronic template* yang menciptakan file elektronik untuk diproses melalui jaringan kliring. Sampai saat ini ada beberapa macam sistem pembayaran dengan menggunakan *e-payment* yaitu :

a. *E-cash*

Merupakan salah satu bentuk dari *electronic payment* yang sekarang ini sangat banyak digunakan. *E-Cash* merupakan gambaran dari simbol elektronik yang memiliki nilai (*bit*) dan seringkali digunakan dalam transaksi barang dan jasa. *E-Cash* dipublikasikan oleh institusi legal, perusahaan dan organisasi. *ECash* biasanya memiliki keterbatasan penerimaan (tergantung seberapa besar *publisher market*-nya) (Trihasta dan Fajaryanti, 2008).

b. *Smart card*

Didefinisikan sebagai kartu sejenis ATM yang disatukan dengan *integrated circuit* (IC) yang mana dapat memproses informasi. *Smart card* juga digunakan untuk menyimpan data pribadi, kesehatan, dan informasi asuransi. Banyak *smart card* yang menggunakan kombinasi password atau PIN (Trihasta dan Fajaryanti, 2008).

c. *E-Cheque*

Sistem *E-Cheque* ini sengaja diciptakan untuk mendukung dan memperluas fungsi belanja online dan cara kerjanya pun sama seperti cek kertas konvensional.

d. *E-Wallet (Electronic Wallet)*

Pembayaran dilakukan dengan menyimpan nomor kartu kredit dalam kondisi terenkripsi dengan aman. Pembelian dilakukan pada situs web yang mendukung *e-wallet* tersebut. Pada saat tombol “pay” ditekan maka proses pembayaran melalui kartu kredit akan dilakukan transaksinya secara aman oleh server perusahaan *e-wallet*.

e. *E-payment*

Aplikasi *e-payment* yang diciptakan oleh pemerintah untuk melayani para wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya. *E-payment* biasanya digunakan sebagai aplikasi khususnya untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Keberhasilan *e-payment* menurut Turban, E., & King D yang dikutip oleh Agung Firmansyah (2013:15) yaitu:

1. *Independent*

Metode *e-payment* yang sukses harus bersifat independen terhadap perangkat lunak yang dapat mempersulit para penggunanya.

2. *Interoperabilitas dan portabilitas*

Artinya *e-payment* harus dapat terhubung dan di terapkan dengan sistem dan aplikasi yang sudah ada serta didukung oleh platform standar komputer yang sudah ada.

3. Keamanan *e-payment* yang bagus adalah *e-payment* yang dapat menjamin keamanan transaksi dalam setiap prosesnya.

4. *Anonimitas*

Berarti seperti kartu kredit atau cek, jika seorang pembeli menggunakan uang tunai, tidak ada cara untuk mencari tahu kembali siapa pemberi uang tunai tersebut. Beberapa orang ingin agar identitas dan pola pemesanan mereka tetap bersifat rahasia. *e-payment* yang sukses harus dapat mengakomodir anonimitas ini.

5. *Divisibility*

Artinya *e-payment* yang mampu menentukan dengan tepat nilai minimum dan maksimum transaksi yang dilakukan akan dapat diterima secara luas.

6. Kemudahan penggunaan *e-payment* yang sukses sebaiknya dapat digunakan semudah mungkin tanpa melalui proses yang dapat mempersulit para penggunanya.

7. Biaya transaksi *e-payment* harus dapat memperoleh keuntungan berdasarkan biaya transaksi untuk menunjang keberlangsungan sistem *e-payment* itu sendiri.

1.6.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konsep menurut (Sugiyono, 2014) adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan di laksanakan.

Hubungan antara *variable penelitian Metode Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor langsung (X_1) Metode pembayaran pajak kendaraan bermotor *e-payment* (X_2).* Pada *Variabel X* yang di teliti adalah perbandingan metode pembayaran dari metode langsung (tunai), ke metode pembayaran menggunakan Non Tunai (*e-payment*).

Metode pembayaran adalah cara yang teratur dan sistematis dalam melakukan pembayaran dalam suatu system yang melakukan penyampaian, pengesahan, dan memenuhi kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran antara perorangan dengan bank atau antara perorangan dengan lembaga lainnya.

Pada pembayaran secara langsung, pelayanan merupakan salah satu kuncinya. Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan (Kusuma, 2014). Kepatuhan wajib pajak bergantung pada bagaimana petugas pajak yang memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada wajib pajak yang sedang dan ingin memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak (Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cakoro, Susilo, & Zahroh (2015) , yang didukung penelitian oleh Ilhamsyah, Endang, & Dewantara (2016), dan Sania, & Yudianto (2018) menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini akan berimbas kepada besar kecilnya penerimaan pajak Daerah.

Dengan kata lain pembayaran tunai atau langsung adanya interaksi antara petugas penerima pajak dengan wajib pajak, maka metode pembayaran langsung juga dapat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah.

E-Payment merupakan model pembayaran yang memudahkan dan memberikan rasa kenyamanan kepada pengguna yang akan melakukan seluruh jenis pembayaran. Namun pengguna hanya memerlukan internet atau jaringan agar transaksi tersebut bisa berjalan dengan lancar sehingga tidak memerlukan adanya sebuah pertemuan. Menurut Pram (2016) *e-payment* merupakan metode pembayaran yang memiliki fasilitas internet sebagai sarana perantara. Sehingga sistem *e-payment* sangat memudahkan dan membantu masyarakat dalam melakukan pembayaran pada semua jenis transaksi kapan pun dan dimana pun. Menurut Nielsen (2016) bahwa *e-payment* itu sendiri merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan pada seluler, sehingga transaksi yang dilakukan oleh semua kalangan dapat dilakukan pada satu jenis perangkat saja.

SAMSAT Kabupaten Ciamis dalam sistem pelayanan pajak kendaraan juga menggunakan cara pembayaran *e-payment* yang lebih dikenal dengan nama *e-payment*. *E-payment* merupakan suatu bentuk inovasi dalam upaya meningkatkan

pendapat daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Sesuai dengan karakteristiknya bahwa pembayaran dengan menggunakan *e-payment* maka wajib pajak akan diberi kemudahan dalam proses pembayaran karena *e-payment* *easy to use* artinya semua kalangan bisa menggunakannya, selain itu aplikasi *e-payment* juga tingkat keamanan nya sangat tinggi karena otoritas nilai uang yang dibayarkan tidak bisa diintervensi oleh orang lain. *E-payment* juga dapat di percaya karena pada saat transaksi pajak, jika sistem *e-payment* nya jalan transaksi tidak akan gagal.

Dengan berbagai kemudahan, keunggulan, keamanan, kecepatan, dan ketetapan, maka pembayaran pajak kendaraan melalui *e-payment*, sebagai sarana utama dalam melakukan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Maka dengan menggunakan metode pembayaran melalui *e-payment* dapat mempengaruhi hasil pendapatan daerah dari sector pajak kendaraan bermotor. Secara konseptual dapat di rumuskan sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Konseptual

1.6.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2
Studi Empiris

PENELITI	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1. Nuryamin, 2016 Inovasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Kantor SAMSAT Makassar	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pajak kendaraan bermotor berbasis elektronik (<i>e-Payment</i>) di Kantor Samsat Makassar merupakan program baru yang dicanangkan oleh Dispenda Kota Makasar melalui UPTD Kantor Samsat.	Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan sistem <i>e-Payment</i>	Lokasi Penelitian Metode Penelitian Kuantitatif. Tujuan penelitian di tekankan pada aspek Pelayanan
2. Musdalifah, 2020. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada UPT. Pendapatan Wilayah Gowa	Pendapatan Wilayah Gowa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor UPT.	Penelitian Tentang Pajak Kendaraan Bermotor secara Langsung.	Lokasi Penelitian Metode Penelitian Menggunakan metode kuantitatif dengan teknik wawancara. Penelitian hanya berfokus pada penerapan pembayaran pajak langsung.
3.Hashiyatul Fadiah Adelina (2019) Strategi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Masa Pandemi Corona virus Disease 2019 oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemungutan pajak kendaraan Bermotor selama masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) berhasil dan berjalan dengan baik.	Penelitian berfokus pada pembayaran pajak baik langsung maupun secara online. Metode penelitian deskriptif Kuantitatif	Fokus Penelitian hanya dilakukan pada saat terjadinya pandemic Covid-19. Adanya penelitian terhadap penerapan denda dan sanksi terhadap para wajib.

PENELITI	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
4. Lina Dwi Riyani (2018) Analisis Sebelum Dan Sesudah Penerapan <i>E-Payment</i> Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Yogyakarta	Penerapan sistem <i>e-Payment</i> sebagai metode pembayaran, menghasilkan perbedaan yang signifikan pada realisasi Pajak Kendaraan Bermotor.	Tujuan penelitian tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui sistem langsung dan melalui sistem <i>e-Payment</i> . Penggunaan Data primer. Analisis Perbandingan metode pembayaran pajak.	Lokasi Penelitian Teknik Pengujian Sampel yang di wawancara sedikit Tidak dihubungkan dengan Pendapatan Daerah

1.6.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data(Sugiyono, 2019 : 96).

Pada penelitian ini maka hipotesisnya adalah:

- H_0 Tidak ada perbedaan yang signifikan antara pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung dan *e-payment* pada Samsat Kabupaten Ciamis
- H_1 Ada perbedaan yang signifikan antara pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung dan *e-payment* pada Samsat Kabupaten Ciamis.

